AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10934

ANALISIS PELAKSANAAN DIGITALISASI ARSIP PENATAAN NAGARI/DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Implementation of Social Forestry Policy at the Nagari Forest Management Institution (LPHN) of Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency

Abdul Hamid Gusri & Rizki Syafril
Universitas Negeri Padang
abdulhamid8969@gmail.com; rizkisyafril@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 13, 2026	Jun 10, 2026	Jun 24, 2026	Jun 29, 2026

Abstract

Although the digitalization of government archives has become an important need in supporting the effectiveness of public administration, the management of nagari/village structuring documents that have administrative and legal value still requires a more organized and easily accessible digital archive system. This study aims to analyze the implementation of digital archive digitalization for nagari/village structuring as an effort to improve the effectiveness of government administration at the Bureau of Government and Regional Autonomy of West Sumatra Province. This study used a descriptive qualitative approach with a case study design. The research data sources included archive management activities, administrative documents, and officials directly involved in the archive digitalization process. Data were collected through direct observation, documentation, and involvement in administrative activities from January to March 2026, and were then analyzed through the stages of data reduction, data

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

display, and conclusion drawing. The results showed that archive digitalization was carried out through the stages of document collection, archive classification, scanning, data input, digital storage, and the creation of document access links. Archive digitalization facilitated document retrieval, accelerated the process of territorial administrative verification, improved employee work efficiency, and reduced the risk of losing physical archives. These findings contribute to the development of studies on archive management and public administration based on the Electronic-Based Government System (SPBE). The implications of this study emphasize the importance of improving employee competence, standardizing digital archive management, and providing adequate information technology facilities to support the effectiveness of government administration on an ongoing basis.

Keywords: Archive Digitalization; Government Administration; Nagari/Village; Administrative Effectiveness; SPBE.

Abstrak: Meskipun digitalisasi arsip pemerintahan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas administrasi publik, pengelolaan dokumen penataan nagari/desa yang memiliki nilai administratif dan hukum masih memerlukan sistem arsip digital yang lebih tertata dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Sumber data penelitian meliputi aktivitas pengelolaan arsip, dokumen administrasi, dan aparatur yang terlibat langsung dalam proses digitalisasi arsip. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi, dan keterlibatan dalam kegiatan administrasi selama Januari hingga Maret 2026, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi arsip dilakukan melalui tahapan pengumpulan dokumen, pengelompokan arsip, pemindaian, penginputan data, penyimpanan digital, dan pembuatan tautan akses dokumen. Digitalisasi arsip mempermudah pencarian dokumen, mempercepat proses verifikasi administrasi wilayah, meningkatkan efisiensi kerja pegawai, serta mengurangi risiko kehilangan arsip fisik. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen arsip dan administrasi publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pegawai, standardisasi pengelolaan arsip digital, dan penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai untuk mendukung efektivitas administrasi pemerintahan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Arsip; Administrasi Pemerintahan; Nagari/Desa; Efektivitas Administrasi; SPBE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong perubahan besar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Gani & Jaya, 2025; Yulanda et al., 2025; Zen et al., 2025). Transformasi digital tidak hanya memengaruhi pola pelayanan publik, tetapi juga mengubah cara instansi pemerintah mengelola data, dokumen, dan arsip sebagai sumber informasi organisasi. Dalam konteks pemerintahan, arsip memiliki peran penting

karena menjadi bukti autentik atas pelaksanaan tugas, dasar pengambilan keputusan, serta sarana pertanggungjawaban kebijakan public (Zebua & Syafril, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang efektif, tertib, dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel (Lestari & Oktarina, 2025; Silondae & Dani, 2025; Teryambodo & Putra, 2024).

Isu pengelolaan arsip menjadi semakin penting karena banyak instansi pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam penataan dokumen administrasi, terutama dokumen yang memiliki nilai hukum dan administratif tinggi (Nugroho, 2025; Risky & Firdaus, 2024; Rodin et al., 2024). Sistem pengelolaan arsip yang masih berbasis kertas sering menimbulkan permasalahan, seperti penumpukan dokumen, risiko kerusakan fisik, keterbatasan ruang penyimpanan, serta lambatnya proses pencarian kembali arsip ketika dibutuhkan (Ningsih et al., 2025). Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas kerja aparatur, terutama dalam pelayanan administrasi yang membutuhkan ketepatan data dan kecepatan verifikasi dokumen. Dalam kerangka reformasi birokrasi, pengelolaan arsip tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan administratif semata, tetapi sebagai bagian dari sistem informasi pemerintahan yang menentukan kualitas pelayanan publik.

Digitalisasi arsip menjadi salah satu respons strategis terhadap persoalan tersebut. Melalui digitalisasi, dokumen fisik dapat dialihmediakan ke dalam bentuk elektronik sehingga lebih mudah disimpan, ditelusuri, diamankan, dan dimanfaatkan kembali. Pengelolaan arsip digital juga memungkinkan instansi pemerintah membangun sistem administrasi yang lebih efisien karena proses pencarian dokumen tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penyimpanan manual. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2025); Rodin et al. (2024); Silondae & Dani (2025) bahwa manajemen arsip yang baik merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan sistem informasi organisasi. Selain itu, transformasi digital dalam organisasi pemerintahan menuntut integrasi teknologi ke dalam proses kerja agar birokrasi mampu beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat dan kompleks (Mozin et al., 2025; Wowiling et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan digitalisasi pemerintahan semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan public (Hasan

et al., 2026; Mozin et al., 2025; Tambunan & Dompak, 2025). Dengan demikian, digitalisasi arsip merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsip digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi antarunit kerja, dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah, khususnya terkait penataan nagari/desa dan administrasi wilayah. Dokumen penataan nagari/desa memiliki karakteristik yang kompleks karena berkaitan dengan keputusan pembentukan, pemekaran, penggabungan, perubahan status administrasi, batas wilayah, data kependudukan, serta berita acara koordinasi antarinstansi. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki nilai hukum yang penting bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah. Apabila dokumen tersebut tidak dikelola secara tertib, maka proses administrasi, verifikasi data, dan penyelesaian persoalan kewilayahan dapat mengalami hambatan.

Nagari sebagai satuan pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat memiliki kekhasan dibandingkan desa pada umumnya. Nagari tidak hanya merepresentasikan wilayah administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial, adat, dan kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip penataan nagari/desa memerlukan sistem dokumentasi yang lebih rapi, akurat, dan berkelanjutan. Misbah et al. (2026) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan nagari, termasuk dalam aspek administrasi dan dokumentasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dokumen memiliki hubungan erat dengan efektivitas kelembagaan pemerintahan lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa digitalisasi arsip dapat meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat akses informasi, dan memperkuat akuntabilitas organisasi. Syafitri et al. (2025) menyatakan bahwa transformasi digital yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengubah proses kerja dan budaya birokrasi. Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi arsip dapat membantu aparatur bekerja lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meminimalkan risiko kehilangan informasi. Namun, sebagian besar

kajian sebelumnya masih membahas digitalisasi arsip secara umum pada lembaga pemerintahan atau organisasi publik, sementara kajian yang secara khusus menganalisis digitalisasi arsip penataan nagari/desa pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat masih terbatas.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan digitalisasi arsip dalam konteks administrasi penataan nagari/desa. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas digitalisasi arsip sebagai proses alih media dokumen, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap efektivitas administrasi pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada konsep manajemen arsip, transformasi digital, dan efektivitas administrasi publik. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk memahami bagaimana penerapan arsip digital dapat memperbaiki proses kerja, meningkatkan kecepatan layanan administrasi, memperkuat keamanan dokumen, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses digitalisasi arsip dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi pemerintahan. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran digitalisasi arsip dalam mendukung modernisasi administrasi pemerintahan daerah, khususnya pada pengelolaan dokumen penataan nagari/desa di Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman fenomena secara alamiah berdasarkan kondisi lapangan, sehingga sesuai digunakan untuk mengkaji proses, kendala, dan dampak digitalisasi arsip terhadap efektivitas administrasi pemerintahan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. Desain ini diarahkan untuk mendeskripsikan secara sistematis pelaksanaan digitalisasi arsip, mulai dari proses alih media dokumen, penataan arsip digital, penyimpanan data, hingga pemanfaatan arsip dalam mendukung kegiatan administrasi pemerintahan. Melalui desain ini, peneliti tidak memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, tetapi mengamati dan mendeskripsikan fenomena sebagaimana terjadi di lapangan. Dengan demikian, desain deskriptif kualitatif dinilai relevan untuk menjawab tujuan penelitian karena mampu memberikan gambaran faktual mengenai praktik digitalisasi arsip penataan nagari/desa dalam konteks kerja pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Januari hingga Maret 2026. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa, sedangkan subjek penelitian meliputi aparatur atau pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan arsip, administrasi penataan nagari/desa, serta penggunaan dokumen digital dalam kegiatan kerja biro. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan atau sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria sumber data dalam penelitian ini adalah pihak yang memahami proses pengelolaan arsip, memiliki keterlibatan langsung dalam administrasi penataan nagari/desa, serta mengetahui perubahan sistem kerja sebelum dan sesudah digitalisasi arsip diterapkan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai pengumpul, pengolah, sekaligus penafsir data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pedoman observasi dan lembar dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati proses digitalisasi arsip, alur penyimpanan dokumen, mekanisme pencarian arsip, serta pemanfaatan arsip digital dalam kegiatan administrasi. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat jenis dokumen yang didigitalisasi, bentuk penyimpanan arsip, sarana pendukung digitalisasi, serta bukti-bukti administratif yang relevan dengan penataan nagari/desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati aktivitas pengelolaan arsip di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan arsip penataan nagari/desa. Melalui observasi, peneliti memperoleh data mengenai proses kerja aparatur, pola penyimpanan arsip, kemudahan akses dokumen, serta kendala

yang muncul dalam pelaksanaan digitalisasi arsip. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung, seperti arsip penataan nagari/desa, data administrasi wilayah, dokumen hasil alih media, serta catatan atau file digital yang digunakan dalam proses administrasi pemerintahan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan digitalisasi arsip dan efektivitas administrasi pemerintahan. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan temuan lapangan. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan data untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi arsip dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas administrasi penataan nagari/desa. Model analisis ini sesuai dengan pendapat Miles et al. (2014) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap memadai.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak atau unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan arsip penataan nagari/desa. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi langsung dengan data dokumentasi yang ditemukan di lapangan. Melalui proses ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih kuat sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan digitalisasi arsip secara lebih objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan kerja yang terstruktur. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dokumen administrasi, pengelompokan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan administrasi, pemindaian dokumen fisik menggunakan perangkat scanner, penyimpanan dokumen dalam bentuk digital, serta penginputan informasi dokumen ke dalam daftar arsip elektronik. Proses

ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penataan nagari/desa dan administrasi kewilayahan.

Tabel 1 menunjukkan tahapan utama pelaksanaan digitalisasi arsip yang ditemukan selama observasi lapangan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Digitalisasi Arsip Penataan Nagari/Desa

No.	Tahapan Digitalisasi	Bentuk Kegiatan
1	Pengumpulan dokumen	Menghimpun arsip fisik terkait penataan nagari/desa dari ruang atau lemari penyimpanan
2	Pengelompokan arsip	Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis, wilayah, dan kebutuhan administrasi
3	Pemindaian dokumen	Melakukan scanning dokumen fisik agar tersedia dalam format digital
4	Penyimpanan data digital	Menyimpan hasil pemindaian ke dalam folder digital dan media penyimpanan daring
5	Penginputan daftar arsip	Memasukkan informasi dokumen ke dalam daftar arsip elektronik agar mudah ditelusuri
6	Pembuatan tautan akses	Membuat tautan dokumen menggunakan layanan penyingkat tautan untuk memudahkan akses internal

Dokumen yang didigitalisasi terdiri atas beberapa jenis arsip administrasi penataan nagari/desa. Jenis dokumen tersebut meliputi surat keputusan, berita acara, data batas wilayah, peta administrasi, dokumen koordinasi, serta dokumen pendukung lainnya. Setiap dokumen dikelompokkan berdasarkan kebutuhan kerja biro, terutama yang berkaitan dengan penataan wilayah, perubahan status administrasi, dan verifikasi data kewilayahan.

Tabel 2. Jenis Dokumen yang Didigitalisasi

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat keputusan	Dokumen keputusan terkait pembentukan, pemekaran, atau penataan nagari/desa
2	Berita acara	Dokumen hasil rapat, koordinasi, atau kesepakatan administrasi wilayah
3	Data batas wilayah	Dokumen yang memuat informasi batas administratif nagari/desa atau daerah
4	Peta administrasi	Peta yang digunakan sebagai pendukung penataan wilayah
5	Dokumen pendukung	Arsip lain yang berhubungan dengan proses administrasi penataan nagari/desa

Hasil observasi menunjukkan bahwa digitalisasi arsip mempermudah pegawai dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan. Sebelum dokumen dialihmediakan ke bentuk digital, pencarian arsip dilakukan dengan membuka berkas fisik yang tersimpan di lemari atau ruangan arsip. Setelah dokumen tersedia dalam bentuk digital, proses pencarian dapat dilakukan melalui folder penyimpanan, daftar arsip elektronik, atau tautan akses dokumen

yang telah disediakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perubahan pola kerja dari pencarian manual menuju pencarian berbasis digital.

Digitalisasi arsip juga berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap arsip fisik dalam kegiatan administrasi harian. Dokumen yang sebelumnya harus dicari secara langsung melalui lemari arsip mulai dapat diakses melalui media penyimpanan digital. Selain itu, arsip yang telah dipindai dapat disimpan dalam beberapa lokasi digital sehingga mempermudah proses pencadangan data. Penggunaan arsip digital juga membantu mengurangi penumpukan dokumen fisik pada ruang kerja, terutama untuk dokumen yang sering digunakan sebagai rujukan administrasi.

Dalam proses penyimpanan dan akses dokumen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan media penyimpanan berbasis digital, salah satunya Google Drive. Dokumen yang telah dipindai kemudian diunggah ke dalam folder penyimpanan daring. Selain itu, beberapa dokumen dibuatkan tautan akses menggunakan layanan penyingkat tautan seperti bit.ly. Tautan tersebut digunakan untuk mempermudah pegawai yang berwenang dalam membuka dokumen tanpa harus mencari file secara manual di dalam folder penyimpanan.

Tabel 3. Media dan Bentuk Pemanfaatan Arsip Digital

No.	Media Digital	Bentuk Pemanfaatan
1	Folder komputer	Menyimpan hasil pemindaian dokumen berdasarkan kategori tertentu
2	Google Drive	Menyimpan dan membagikan dokumen secara daring kepada pegawai yang berwenang
3	Daftar arsip elektronik	Mencatat informasi dokumen agar mudah ditemukan kembali
4	Tautan bit.ly	Mempermudah akses cepat terhadap dokumen tertentu
5	File hasil scanning	Menyediakan salinan digital dari dokumen fisik

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa digitalisasi arsip mendukung koordinasi antarpegawai dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Dokumen yang telah tersedia dalam bentuk digital dapat dibagikan melalui tautan atau media penyimpanan daring kepada pegawai yang membutuhkan. Hal ini memudahkan proses verifikasi, pemeriksaan, dan penggunaan ulang dokumen dalam kegiatan administrasi. Dengan adanya arsip digital, pegawai tidak selalu harus menggunakan dokumen fisik secara langsung ketika membutuhkan rujukan administrasi tertentu.

Digitalisasi arsip juga berperan dalam mendukung kegiatan verifikasi data administrasi wilayah. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pemanfaatan

arsip digital untuk menelusuri dokumen berita acara batas wilayah dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penetapan batas daerah. Dokumen tersebut digunakan dalam proses verifikasi administrasi batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga, seperti Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Utara. Arsip yang telah dikelompokkan secara digital memudahkan pegawai dalam menemukan dokumen berdasarkan subsegmen batas daerah yang dibutuhkan.

Dari aspek sumber daya manusia, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pegawai terlibat langsung dalam beberapa aktivitas digitalisasi, seperti memindai dokumen, mengelompokkan file, memberi nama dokumen, menginput daftar arsip, serta menyimpan dokumen ke media digital. Keterlibatan ini menunjukkan adanya perubahan keterampilan kerja pegawai dalam pengelolaan arsip. Pegawai yang sebelumnya lebih banyak menggunakan sistem pengarsipan manual mulai menyesuaikan diri dengan perangkat digital yang digunakan dalam proses administrasi.

Namun, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan digitalisasi arsip. Kendala pertama berkaitan dengan kondisi dokumen lama yang belum tertata secara optimal. Beberapa dokumen masih tersebar di berbagai tempat penyimpanan sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam proses pengumpulan dan pengelompokan. Kendala kedua berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Tidak semua pegawai memiliki tingkat penguasaan teknologi digital yang sama, sehingga proses adaptasi terhadap sistem arsip digital berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kendala ketiga berkaitan dengan fasilitas pendukung, terutama keterbatasan perangkat scanner dan kebutuhan jaringan internet yang stabil.

Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Digitalisasi Arsip

No.	Bentuk Kendala	Temuan Lapangan
1	Dokumen lama belum tertata	Beberapa arsip fisik masih tersebar dan membutuhkan waktu untuk dikumpulkan
2	Perbedaan kemampuan digital pegawai	Sebagian pegawai membutuhkan bimbingan lebih dalam penggunaan sistem digital
3	Keterbatasan perangkat scanner	Proses pemindaian dokumen dalam jumlah besar membutuhkan waktu lebih lama
4	Ketergantungan pada internet	Akses dokumen daring membutuhkan jaringan internet yang stabil
5	Pengelompokan file belum seragam	Penamaan dan penyusunan folder digital masih memerlukan penertiban lebih lanjut

Data negatif atau anomali juga ditemukan dalam pelaksanaan digitalisasi arsip. Meskipun arsip digital mempercepat akses dokumen, tidak semua dokumen dapat langsung

dialihmediakan karena sebagian arsip fisik membutuhkan proses pemeriksaan, pemilahan, dan penyesuaian nama file terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan media penyimpanan daring mempermudah akses, tetapi pada saat yang sama menuntut pengaturan kewenangan akses agar dokumen administrasi tidak dibuka oleh pihak yang tidak berkepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi arsip telah memberikan manfaat administratif, tetapi masih memerlukan penataan lanjutan pada aspek klasifikasi dokumen, keamanan akses, dan standardisasi penyimpanan file.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, digitalisasi arsip penataan nagari/desa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berjalan melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, pemindaian, penyimpanan, dan penginputan arsip elektronik. Hasil observasi menunjukkan bahwa digitalisasi membantu mempercepat pencarian dokumen, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, mendukung koordinasi antarpegawai, serta mempermudah verifikasi data administrasi wilayah. Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi kendala berupa dokumen lama yang belum tertata, keterbatasan perangkat, perbedaan kemampuan digital pegawai, serta kebutuhan penguatan sistem keamanan dan standardisasi arsip digital.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berjalan melalui tahapan yang cukup sistematis, mulai dari pengumpulan dokumen, pengelompokan arsip, pemindaian dokumen fisik, penyimpanan dokumen digital, penginputan ke daftar arsip elektronik, hingga pembuatan tautan akses dokumen. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi arsip tidak hanya dipahami sebagai proses memindai dokumen fisik ke bentuk digital, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem kerja administrasi yang lebih tertib, mudah ditelusuri, dan mendukung kebutuhan organisasi. Dalam konteks tujuan penelitian, proses tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi arsip berperan dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan, khususnya pada pengelolaan dokumen penataan nagari/desa yang memiliki nilai administratif dan hukum.

Temuan mengenai kemudahan pencarian dokumen menunjukkan bahwa arsip digital memberikan kontribusi langsung terhadap efisiensi kerja pegawai. Sebelum digitalisasi dilakukan, pencarian dokumen administrasi masih bergantung pada arsip fisik yang tersimpan

di lemari atau ruang arsip (Kurniawan & Putra, 2025; Silondae & Dani, 2025). Kondisi tersebut membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika dokumen yang dicari merupakan arsip lama atau berkaitan dengan data batas wilayah yang kompleks. Setelah dokumen dialihmediakan ke dalam bentuk digital, pegawai dapat menemukan arsip melalui folder penyimpanan, daftar arsip elektronik, atau tautan akses yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi arsip mampu memperpendek alur kerja administrasi dan mengurangi ketergantungan pada sistem pengarsipan manual.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep manajemen arsip yang menempatkan arsip sebagai sumber informasi organisasi. Husna et al. (2024) menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting bagi sistem informasi yang andal. Dalam konteks penelitian ini, arsip penataan nagari/desa berfungsi sebagai sumber data utama dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah. Ketika arsip dapat ditemukan secara cepat dan disimpan secara sistematis, maka proses administrasi, verifikasi, dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kualitas manajemen arsip berpengaruh terhadap kualitas tata kelola administrasi dalam organisasi pemerintahan.

Digitalisasi arsip juga terbukti mendukung koordinasi antarpegawai dan antarbagian dalam pengelolaan administrasi pemerintahan (Kurniawan & Putra, 2025). Penggunaan Google Drive dan tautan akses seperti bit.ly memungkinkan dokumen dibagikan kepada pegawai yang berwenang tanpa harus memindahkan arsip fisik dari satu tempat ke tempat lain. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan Bao et al. (2023) bahwa penerapan electronic government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian ini, digitalisasi arsip menjadi bagian dari praktik pemerintahan elektronik karena mampu mempercepat pertukaran informasi dan mendukung pelayanan administrasi yang lebih responsif.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa digitalisasi arsip memberikan manfaat dalam kegiatan verifikasi data administrasi wilayah, terutama terkait dokumen batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga. Dokumen berita acara, peta administrasi, dan data batas wilayah yang telah tersimpan secara digital memudahkan pegawai dalam menelusuri kembali informasi historis yang dibutuhkan.

Temuan ini penting karena dokumen penataan wilayah tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam proses koordinasi lintas daerah dan pengambilan keputusan pemerintahan. Dengan kata lain, digitalisasi arsip memperkuat keandalan data yang digunakan dalam administrasi kewilayahan.

Temuan tersebut relevan dengan kajian (Huriyati & Huriyati, 2024) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan nagari, termasuk aspek administrasi dan dokumentasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi arsip penataan nagari/desa dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan kelembagaan administrasi pemerintahan daerah. Arsip yang tersusun secara digital membantu biro dalam menyediakan data yang lebih rapi, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi arsip tidak hanya berdampak pada efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola informasi pemerintahan.

Dari sisi sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip mendorong pegawai untuk beradaptasi dengan teknologi. Pegawai yang sebelumnya terbiasa dengan pengelolaan arsip manual mulai terlibat dalam kegiatan pemindaian, penamaan file, penyusunan folder, penginputan data, dan pengelolaan dokumen daring. Proses ini menunjukkan adanya pembelajaran organisasi yang terjadi melalui praktik kerja sehari-hari. Namun, perbedaan kemampuan digital antarpegawai menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan digitalisasi. Sebagian pegawai membutuhkan waktu dan pendampingan lebih untuk memahami sistem pengarsipan digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Anggraini et al. (2025) bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan perubahan budaya kerja organisasi.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan fasilitas pendukung, seperti jumlah scanner, komputer, jaringan internet, dan standardisasi penamaan file. Kendala ini menunjukkan bahwa digitalisasi arsip tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai. Kurniawan & Putra (2025) menekankan bahwa pengelolaan arsip membutuhkan sistem, sarana, dan sumber daya manusia yang saling mendukung. Dalam penelitian ini, keterbatasan perangkat menyebabkan proses pemindaian dokumen dalam jumlah besar membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, belum seragamnya sistem pengelompokan dan penamaan file dapat memengaruhi kemudahan temu kembali

arsip digital. Oleh karena itu, digitalisasi arsip perlu didukung dengan standar operasional prosedur yang jelas agar hasil digitalisasi dapat digunakan secara konsisten.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat tata kelola arsip digital secara berkelanjutan. Digitalisasi arsip perlu dilihat sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Penerapan arsip digital dapat membantu instansi meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat layanan administrasi, memperkuat koordinasi, serta mendukung akuntabilitas dokumen pemerintahan. Selain itu, arsip digital yang tertata juga dapat memudahkan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik dan manajemen arsip, khususnya dalam konteks digitalisasi arsip pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menjalankan prosedur kerja, tetapi juga oleh ketersediaan sistem informasi arsip yang dapat mendukung kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas pengelolaan dokumen. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa digitalisasi arsip merupakan bagian dari transformasi administrasi publik, bukan sekadar aktivitas teknis pengalihan media dokumen.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh instansi pemerintahan daerah. Kedua, data penelitian diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan persepsi mendalam dari seluruh pegawai yang terlibat dalam digitalisasi arsip. Ketiga, penelitian ini belum mengukur efektivitas digitalisasi secara kuantitatif, misalnya melalui perbandingan waktu pencarian arsip sebelum dan sesudah digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan, menggunakan wawancara mendalam, serta menambahkan data kuantitatif agar dampak digitalisasi arsip terhadap efektivitas administrasi dapat diukur secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip penataan nagari/desa di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berkontribusi positif terhadap efektivitas administrasi pemerintahan. Digitalisasi arsip mempermudah proses pencarian dan penelusuran dokumen, mempercepat verifikasi data administrasi wilayah, mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik, serta mendukung koordinasi antarpegawai melalui pemanfaatan media penyimpanan digital. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa digitalisasi arsip bukan hanya berfungsi sebagai proses alih media dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari modernisasi tata kelola administrasi pemerintahan daerah yang lebih tertib, efisien, akuntabel, dan sejalan dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian administrasi publik dan manajemen arsip, khususnya dalam konteks digitalisasi dokumen penataan nagari/desa sebagai arsip yang memiliki nilai administratif dan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip digital melalui penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan keamanan akses dokumen, serta penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan, menggunakan wawancara mendalam, membandingkan beberapa instansi pemerintahan daerah, serta menambahkan pengukuran kuantitatif seperti waktu pencarian arsip sebelum dan sesudah digitalisasi agar dampak digitalisasi terhadap efektivitas administrasi dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, J., Oktadinna, N. K., & Martini, M. (2025). Transformasi sumber daya manusia dalam era industri 5.0: Tantangan dan peluang pengembangan karyawan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, *6*(1), 252–266. https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6719.

Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan e-government dalam pelayanan publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, *5*(2), 4147–4157. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3564.

Gani, K., & Jaya, M. (2025). Birokrasi Publik di Era Digital: Tantangan dan Peluang Reformasi Administrasi Pemerintahan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *6*(1), 104–112. https://journal.ipinternasional.com/index.php/ijip/article.

Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Transparansi dan Mencegah Korupsi pada Sektor Pelayanan Publik. *JURNAL*

MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK, *3*(3), 24–36. https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jmia/article.

Huriyati, I. M., & Huriyati, K. (2024). Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Dana Desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 2493–2503. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article.

Husna, K., Lubis, R. D., Fahrezi, M. A., & Darmansah, T. (2024). Membangun sistem kearsipan berkualitas untuk mendukung tata kelola kantor yang baik di SD IT Al-Hijrah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(4), 384–394. https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/jmpai/article.

Kurniawan, R., & Putra, P. (2025). Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, *1*(3), 112–135. https://jurnalalzayn.com/index.php/alzayn/article.

Lestari, D., & Oktarina, T. (2025). Analisis Proses Pengelolaan Arsip Dinamis Di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. *Impression: Jurnal Teknologi Dan Informasi*, *4*(1), 70–75. https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.

Misbah, R., Pramessella, M. A., Dewi, T. R., & Pertiwi, G. (2026). Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari:(Studi Kasus Nagari Sulit Air, Sumatera Barat). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 507–517. https://jurnalalzayn.com/index.php/alzayn.

Mozin, S. Y., Pakaya, R., Anggraini, M., Amanda, N. M., Lestari, D. A., Sampara, M. P., & Lanio, A. H. (2025). Kelembagaan pemerintahan di era smart governance: Strategi reformasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(11), 7218–7227. https://jks.uho.ac.id/index.php/journal.

Ningsih, V. A., Ibranaldi, H., Illahi, M. F., Candra, I. F., & Syafril, R. (2025). IMPLEMENTASI PUBLIC SERVICE PADA PEMERINTAHAN TINGKAT LOKAL: STUDI KASUS KANTOR WALI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK DAN KELURAHAN NAN BALIMO KOTA SOLOK. *EDU RESEARCH*, *6*(4), 2215–2230. https://journal.ipinternasional.com/index.php/eduresearch.

Nugroho, M. R. (2025). Analisis Pengelolaan Arsip Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Wirokerten. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(2), 150–159. https://journal.ipinternasional.com/index.php/jlphi.

Risky, P. A. R., & Firdaus, M. (2024). Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kantor Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, *4*(2), 588–600. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/mizaniahttps://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/mizania/article.

Rodin, R., Maulani, L. H., & Fatmasari, F. (2024). Dampak Rendahnya Kompetensi Pengelola Dokumen terhadap Akuntabilitas Kelembagaan di Era Digital. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, *14*(1), 156–164. https://doi.org/10.24036/ib.v14i1.

Silondae, T. T. A., & Dani, W. O. D. P. S. (2025). Penataan Arsip Organisasi Pada PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, *2*(2), 181–192. https://ejournal.uho.ac.id/index.php/jkdpk.

Syafitri, I., Nurman, N., Mardatillah, A., & Hefriyenni, R. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD): Studi Kesiapan SDM dalam Era Transformasi Digital di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *11*(2), 277–301. https://publika.fisip.unri.ac.id/index.php/publika.

Tambunan, M., & Dompak, T. (2025). Peran E-Government Dalam Peningkatan Efesiensi Dan Efektivitas Pelayananan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *12*(1), 281–288. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/professional.view345/.

Teryambodo, A., & Putra, P. (2024). Analisis pengelolaan arsip dalam upaya tertib arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, *1*(1), 1–20. https://journalterekamjejak.com/index.php/jem.

Wowiling, N. G., Pondaag, J. J., Wullur, M., & Palandeng, I. D. (2026). Dari Birokrasi Ke Digital (Sebuah Pendekatan Manajemen Strategik): Strategi Membangun Pelayanan Publik yang Unggul. *AMU Press*, 1–191. : https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/JKHKP.

Yulanda, S. R., Aldino, F. E., Anvasha, N., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, *2*(2), 1349–1354. : https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/JKHKP.

Zebua, B., & Syafril, R. (2024). The Role Of The Community And Village Empowerment Office Of West Sumatra Province In Increasing The Capacity Of BUMnag Management: Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, *8*(1), 222–232.

Zen, N. H., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan good governance di era digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 29–40. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.